

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

Elsa Putri Herlanda
NPP 32.0368

*Asdaf Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email : elsaherlanda136@gmail.com*

Pembimbing Skripsi : Dr. Dra. Hj. Wiwit Yuhita Effendi, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/background (GAP): *The Family Hope Program (PKH) aims to improve the welfare of poor families through conditional cash transfers and has been implemented nationally as a poverty reduction effort. However, in the City of Sukabumi, there are still beneficiaries who do not meet eligibility criteria, as well as low understanding among new participants regarding the program's mechanisms. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of PKH implementation in improving community welfare in the City of Sukabumi. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method through in-depth interviews (5 informants), observation, and documentation. The effectiveness analysis is based on Edy Sutrisno's (2007) theory, which consists of five indicators: program understanding, right on target, timeliness, goal achievement, and actual change. **Result/Findings:** The findings show that out of the five effectiveness indicators, only three are well achieved timeliness, achievement of goals, and observable change. However, the remaining two indicators, namely program understanding and accuracy of targeting, have not been optimized. The main obstacles identified include inaccurate beneficiary data, limited participant understanding, and a lack of both quantity and capacity of social facilitators. Efforts to overcome these challenges include data updating, training for program facilitators, and continuous socialization to the community.. **Conclusion:** The implementation of the Family Hope Program in the City of Sukabumi has not been effective and still requires improvements in socialization, data accuracy, and program assistance.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan bersyarat dan telah diterapkan secara nasional sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, di Kota Sukabumi masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria serta rendahnya pemahaman peserta baru terhadap mekanisme program. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kota Sukabumi. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam (5 informan) , observasi, dan dokumentasi. Analisis efektivitas program dilakukan dengan menggunakan teori menurut Edy Sutrisno (2007) yang mencakup lima indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima indikator efektivitas yang digunakan, hanya tiga indikator yang tercapai dengan baik, yaitu tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun dua indikator lainnya, yaitu

pemahaman program dan tepat sasaran belum optimal. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi ketidakakuratan data penerima manfaat, kurangnya pemahaman peserta, dan terbatasnya jumlah serta kapasitas pendamping sosial. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini meliputi pemutakhiran data, pelatihan bagi pendamping program, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat. **Kesimpulan :** Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Sukabumi belum efektif dan masih memerlukan perbaikan pada aspek sosialisasi, akurasi data, dan pendampingan program.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, efektivitas, kesejahteraan masyarakat, Kota Sukabumi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi (Nazarudin, 2021). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai dasar pembangunan berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 18, 2020).

Sebagai bentuk nyata dari strategi pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program perlindungan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM). PKH bertujuan tidak hanya untuk meringankan beban ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang (Magfira & Saharuddin, 2022). Dalam pelaksanaannya, penerima manfaat PKH diwajibkan untuk memenuhi komitmen tertentu, seperti menyekolahkan anak, membawa balita ke posyandu, dan melakukan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil (Osei & Zhuang, 2020).

Evaluasi terhadap implementasi PKH menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kabupaten Bantul, misalnya, pelaksanaan PKH secara umum dinilai cukup baik, dengan kegiatan pencairan bantuan, verifikasi komitmen, dan pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterlambatan pencairan bantuan serta perlunya peningkatan akurasi data penerima, karena ditemukan adanya peserta yang sudah tidak layak tetapi masih menerima bantuan (Hadirianto et al., 2023).

Hal serupa juga ditemukan di Kecamatan Karawang Barat. Evaluasi terhadap efektivitas dan kecukupan program menunjukkan hasil yang memadai. Namun, indikator efisiensi, pemerataan, dan ketepatan sasaran masih belum optimal. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia pelaksana PKH, kesulitan dalam mengubah pola pikir keluarga penerima manfaat, dan distribusi bantuan yang tidak merata (Kurniawan et al., 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas PKH, sinergi lintas sektor sangat diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi, melakukan pembaruan data secara berkala, serta meningkatkan kapasitas SDM pelaksana. Selain itu, peran serta masyarakat dan lembaga non-pemerintah juga penting dalam melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada keluarga penerima manfaat (Yin et al., 2023).

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang menysasar keluarga dengan kondisi ekonomi rendah (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), dengan syarat mereka harus memenuhi kewajiban tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini berfokus pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, serta penyandang disabilitas dan lansia (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Sejak diterapkan, PKH telah menunjukkan kontribusi penting dalam mendorong masyarakat miskin untuk lebih aktif memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia.

Dalam praktiknya, efektivitas PKH sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, dan sinergi dengan fasilitas pelayanan dasar. Di beberapa daerah, seperti Kota Parepare, pelaksanaan PKH terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan KPM melalui kegiatan pendampingan rutin, pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan secara konsisten (Ismayana et al., 2023).

Namun, implementasi PKH tidak selalu berjalan optimal. Studi evaluatif yang dilakukan di Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas dan pemerataan bantuan. Beberapa indikator evaluasi seperti kecukupan dan ketepatan masih dinilai kurang, meskipun efisiensi program telah tercapai (Hadirianto et al., 2023). Hal ini menandakan pentingnya evaluasi lokal atas implementasi PKH untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan dampak yang diharapkan (OECD Comparative Study, 2016).

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam mendukung seleksi KPM juga mulai diterapkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Misalnya, sistem berbasis web dengan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan di tingkat desa mampu memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan (Ismayana et al., 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi dalam tata kelola data dan teknologi informasi dapat berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas program sosial (Lambsdorff, 2001).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi sebagai salah satu wilayah yang menerima implementasi PKH memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik, sehingga penting untuk diteliti sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan PKH di masa mendatang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah di Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam konteks lokal Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar kajian yang ada lebih banyak menitikberatkan pada pelaksanaan administratif, evaluasi kebijakan umum, dan tantangan struktural di wilayah lain, seperti di Kabupaten Sidrap (Putri, 2023) dan Kecamatan Medan (Nasution, 2024). Padahal, setiap wilayah memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang unik yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Kota Sukabumi sebagai daerah perkotaan yang relatif kecil namun padat penduduk menghadapi tantangan kemiskinan yang cukup kompleks, terutama di kawasan padat dan marginal. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Sukabumi (2023), masih terdapat sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek kesejahteraan, seperti pendapatan, akses pendidikan anak, dan pemanfaatan layanan kesehatan. Selain itu, temuan lapangan menunjukkan masih terdapat persoalan dalam

hal akurasi data penerima, kurangnya intensitas pendampingan, serta keterbatasan koordinasi antara pendamping PKH dengan instansi terkait di tingkat kelurahan.

Permasalahan lain yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya adalah bagaimana persepsi dan pengalaman langsung KPM terhadap program ini, serta sejauh mana PKH mampu memberikan dampak transformasional, bukan hanya bersifat bantuan sementara. Belum ada kajian mendalam yang melihat efektivitas PKH secara multi-dimensional di Kota Sukabumi, misalnya dari sisi keberdayaan keluarga, perubahan perilaku sosial, maupun ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara empiris bagaimana implementasi PKH berjalan di Kota Sukabumi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus lokal ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi peningkatan kebijakan dan pelaksanaan PKH di wilayah serupa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dijadikan bahan referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis menggunakan 5 (lima) penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Penelitian pertama oleh Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh (2019) mengenai efektivitas PKH di Desa Kupu menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk penetapan rumah tangga sasaran, sosialisasi, serta verifikasi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, dengan fokus pada berbagai indikator efektivitas yang berbeda, seperti akurasi target, pemantauan program, dan sosialisasi. (Sutjiatmi & Umaroh, 2019)

Penelitian kedua oleh Baiq Dewi Kamariani et al. (2020) di Suryawangi Village mengungkapkan bahwa efektivitas PKH dinilai baik dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan indikator seperti pemahaman program, ketepatan waktu, dan pencapaian tujuan. Seperti penelitian lainnya, penelitian ini juga mengukur efektivitas PKH dengan indikator yang serupa, namun menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti ketepatan waktu dan target yang masih perlu diperbaiki meskipun efektivitas program dinilai baik. (Kamariani et al, 2019)

Penelitian ketiga oleh Novi Kadewi Sumbawati et al. (2020) di Desa Ropang menunjukkan bahwa program PKH efektif dengan skor 78,8%, menggunakan indikator seperti akurasi target, pemahaman tujuan program, sosialisasi, dan pemantauan. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang menilai efektivitas PKH menggunakan indikator yang serupa. Namun, penelitian ini lebih menekankan pentingnya akurasi target dan sosialisasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. (Sumbawati et al., 2020)

Penelitian keempat oleh Desi Rahma Yani et al. (2020) di Kelurahan Watolo menemukan bahwa efektivitas PKH cukup baik meskipun ada masalah dalam penyaluran bantuan yang tidak menentu. Seperti penelitian lainnya, penelitian ini mengukur efektivitas PKH berdasarkan kriteria yang hampir serupa. Namun, penelitian ini mengidentifikasi masalah

ketidakpastian dalam waktu penyaluran bantuan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. (Yani et al., 2020)

Penelitian kelima oleh Ervin Gunawan et al. (2023) di Desa Matang Terap menunjukkan bahwa program PKH belum sepenuhnya efektif, dengan beberapa indikator seperti pemutakhiran data penerima bantuan dan pemantauan program yang tidak dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini mengukur efektivitas PKH dengan indikator yang sama, namun temuan ini menunjukkan adanya hambatan dalam pemantauan program yang terbatas hanya pada pertemuan kelompok dan kendala lain akibat pandemi. (Gunawan et al., 2023)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian tentang efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Sukabumi ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui fokus lokasi studi yang belum banyak diangkat sebelumnya. Kota Sukabumi, sebagai daerah urban dengan kombinasi antara pusat kota dan wilayah pinggiran, memiliki karakteristik mobilitas penduduk tinggi, struktur sosial yang heterogen, serta disparitas akses layanan publik yang hingga kini belum banyak dijadikan objek kajian dalam studi PKH. Dengan menggunakan kerangka efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007) yang terdiri dari lima indikator utama yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, penelitian ini menggali secara mendalam bagaimana kelima dimensi tersebut berfungsi dalam dinamika perkotaan. Fokus lokasi yang unik ini memungkinkan identifikasi hambatan dan peluang pelaksanaan PKH yang berbeda dari konteks rural, sehingga menyajikan data empiris baru tentang efektivitas program di wilayah perkotaan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan di desa atau wilayah rural, diantaranya Sutjiatmi & Umaroh (2019) menyoroti alur pelaksanaan dan verifikasi di Desa Kupu; Kamariani et al. (2020) fokus pada beban pengeluaran dan ketepatan waktu di Suryawangi; Sumbawati et al. (2020) mengukur akurasi target dan sosialisasi di Desa Ropang; Yani et al. (2020) menelaah penyaluran bantuan di Watolo; serta Gunawan et al. (2023) mengevaluasi pemutakhiran data dan pemantauan di Matang Terap. Berbeda dengan kelima penelitian tersebut yang menilai 3–4 indikator dan bersandar pada konteks pedesaan, penelitian ini memadukan kelima indikator efektivitas dalam satu kerangka analisis yang utuh serta menyesuaikannya dengan tantangan perkotaan di Kota Sukabumi, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi data empiris baru, tetapi juga menawarkan sudut pandang analitis yang berbeda dalam mengkaji efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan yang dinamis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali pengalaman subjektif dan pandangan para pelaksana serta penerima manfaat PKH, yang tidak dapat diungkap melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data, khususnya karena fenomena yang diteliti bersifat dinamis dan kontekstual (Simangunsong, 2017).

Penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, guna mendapatkan gambaran menyeluruh dan kontekstual terkait pelaksanaan PKH yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 25 Januari 2025 di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, karena daerah ini memiliki pelaksanaan PKH yang cukup aktif dan dapat mewakili dinamika program secara umum. Lokasi penelitian mencakup kantor Dinas Sosial serta beberapa kecamatan tempat KPM tinggal.

Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2007) yang terdiri dari lima indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata (Sutrisno, 2007). Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yakni individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi maupun dampak program. Informan kunci yang menjadi fokus utama antara lain Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi yang memahami kebijakan dan arah strategis program, serta Penyuluh Sosial yang memahami proses teknis pelaksanaan di lapangan. Koordinator PKH dan Pendamping PKH juga menjadi informan penting karena mereka berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat. Selain itu, dua kategori KPM (Keluarga Penerima Manfaat), yaitu keluarga yang telah keluar dari program karena dinilai mandiri dan keluarga yang baru bergabung, turut diwawancarai untuk memberikan perspektif dari sisi penerima program. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan holistik, dari pembuat kebijakan hingga penerima manfaat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diukur menggunakan teori efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007) yang terdiri dari 5 indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata (Sutrisno, 2007). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Pemahaman Program

Pemahaman mengenai program PKH oleh keluarga penerima dan pelaksana menjadi fondasi utama dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan program ini. Tanpa pemahaman yang baik, baik penerima maupun pelaksana dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan atau memanfaatkan program secara optimal. Dalam penelitian ini, aspek pemahaman dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sejauh mana penerima memahami tujuan dan kewajiban mereka dalam PKH, dan bagaimana efektivitas penyampaian informasi oleh pelaksana agar pesan mengenai PKH sampai dengan jelas dan mudah dipahami masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah keluarga penerima manfaat, keluarga yang telah lama menjadi peserta program umumnya telah memahami bahwa bantuan PKH bersifat bersyarat dan bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan. Hal ini diperoleh dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa pemahaman mereka berkembang seiring intensitas pertemuan bulanan dan pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh petugas PKH. Sebaliknya, keluarga yang baru tergabung dalam program mengaku masih mengalami kebingungan, terutama dalam memahami kewajiban-kewajiban sebagai penerima bantuan. Informan mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mendapat penjelasan awal, pemahaman terhadap detail prosedural, seperti pemutakhiran data dan pemenuhan kewajiban bulanan, belum sepenuhnya dimengerti. Hal ini diperkuat oleh observasi peneliti yang menemukan bahwa tingkat partisipasi aktif dalam forum P2K2 lebih tinggi pada KPM lama dibandingkan yang baru, menunjukkan perbedaan tingkat literasi program antar kelompok waktu keterlibatan.

Penyampaian informasi oleh pelaksana, mulai dari Kepala Dinas Sosial, penyuluh sosial, hingga pendamping lapangan, memegang peranan penting dalam memastikan pesan PKH tersampaikan secara tepat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pelaksana, mekanisme penyampaian informasi telah dirancang dengan berbagai metode agar bisa menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi. Penyuluh sosial, menjelaskan bahwa materi penyuluhan disusun sesuai pedoman resmi, namun kunci keberhasilan efektivitas penyampaian tetap bergantung pada intensitas serta frekuensi pendampingan. Kesimpulannya, indikator pemahaman program masih belum optimal dan perlu penguatan dalam sosialisasi khususnya bagi KPM baru, serta penyesuaian media komunikasi terhadap kemampuan literasi masyarakat.

3.2 Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan merupakan aspek krusial yang sangat menentukan efektivitas PKH. Bantuan yang diberikan harus benar-benar sampai kepada keluarga yang memenuhi syarat dan benar-benar membutuhkan. Jika penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, maka tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Dalam pelaksanaan PKH di Kota Sukabumi, verifikasi data menjadi proses utama untuk memastikan validitas data penerima manfaat. Proses ini melibatkan pendamping yang melakukan kunjungan lapangan, verifikasi data melalui Basis Data Terpadu (BDT), serta evaluasi rutin di tingkat kecamatan. Meskipun masih terdapat kendala, seperti kelemahan aplikasi cek bansos dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, tim pelaksana berusaha maksimal untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa data yang digunakan merupakan data yang paling akurat dan *up to date*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ditemukan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Sukabumi belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa informan menyatakan bahwa masih terdapat penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria kemiskinan, tetapi tetap menerima bantuan karena belum dilakukan proses graduasi atau pemutakhiran data. Salah satu pendamping PKH menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi karena proses pemutakhiran data di tingkat kelurahan berjalan lambat dan belum semua wilayah secara aktif melakukan verifikasi ulang secara berkala.

Observasi peneliti di beberapa pertemuan kelompok KPM menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kondisi ekonomi peserta. Beberapa keluarga terlihat sudah cukup sejahtera namun masih terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, ada pula warga sekitar yang menurut aparat kelurahan lebih layak tetapi belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini menunjukkan bahwa validitas data masih menjadi permasalahan utama dalam ketepatan sasaran program. Pendamping mengakui bahwa keterbatasan jumlah personel juga menghambat kelengkapan verifikasi data lapangan. Oleh karena itu, meskipun sudah ada mekanisme evaluasi dan monitoring data, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin program tepat sasaran.

3.3 Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan PKH tidak hanya berarti pencairan dana bantuan tepat jadwal, tapi juga penyampaian informasi jadwal secara akurat kepada keluarga penerima. Ketepatan waktu ini sangat penting agar keluarga bisa segera memanfaatkan bantuan dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Dalam PKH, pencairan bantuan dilakukan empat kali setahun dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan disertai dengan komunikasi yang konsisten agar tidak terjadi kebingungan.

Hasil wawancara dengan informan dari pendamping sosial dan KPM menunjukkan bahwa secara umum penyaluran bantuan PKH di Kota Sukabumi telah dilakukan tepat waktu sesuai jadwal triwulanan dari Kementerian Sosial. Beberapa KPM menyatakan bahwa mereka menerima dana bantuan pada waktu yang telah ditentukan, tanpa keterlambatan signifikan. Pendamping PKH juga menegaskan bahwa mekanisme penyaluran yang bekerja sama dengan bank HIMBARA seperti BRI sudah cukup efektif dalam mendistribusikan dana langsung ke rekening KPM.

Namun, dari hasil observasi di lapangan dan konfirmasi pendamping, ditemukan bahwa tidak semua KPM dapat langsung mencairkan dana bantuan karena terkendala masalah administratif seperti perubahan status kependudukan, ketidaksesuaian nama di rekening bank, atau lokasi penyaluran yang sulit dijangkau oleh KPM tertentu. Contohnya terjadi pada KPM di wilayah Gunungpuyuh dan Lembursitu, yang menyebutkan bahwa jarak ke ATM atau e-warong masih cukup jauh. Hal ini menyebabkan beberapa KPM mengalami keterlambatan dalam pencairan meskipun dana sudah masuk ke rekening mereka. Dalam kegiatan monitoring penyaluran, pendamping juga melakukan pengecekan data dan mendampingi KPM yang mengalami kendala administratif. Oleh karena itu, meskipun penyaluran secara umum tergolong tepat waktu, tetap dibutuhkan penguatan akses layanan keuangan serta pendampingan yang intensif agar seluruh KPM dapat menerima dan menggunakan bantuan secara maksimal sesuai jadwal.

3.4 Tercapainya Tujuan

Tujuan utama PKH adalah mendorong keluarga yang awalnya bergantung pada bantuan sosial untuk mencapai kemandirian ekonomi. Indikator utama keberhasilan program adalah penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunjukkan bahwa keluarga-keluarga tersebut berhasil memperbaiki kondisi ekonomi dan sosialnya sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Selain itu, persepsi positif dari informan yang terlibat memperkuat bukti keberhasilan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM, mereka mengakui bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam membeli kebutuhan sekolah anak, seperti seragam dan perlengkapan belajar, serta mendukung biaya transportasi sekolah. Selain itu, bantuan tersebut juga digunakan untuk menunjang kebutuhan kesehatan, seperti membawa anak ke posyandu atau membeli makanan tambahan ketika diperlukan. Observasi peneliti terhadap kegiatan KPM menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga penerima bantuan cenderung memiliki tingkat kehadiran sekolah yang stabil, dan balita dalam keluarga tersebut tercatat secara rutin mengikuti kegiatan posyandu.

Di beberapa lokasi, terutama di wilayah Citamiang dan Cibeureum, pendamping sosial juga memantau langsung pemenuhan kewajiban tersebut melalui pencatatan kehadiran dan kunjungan. Beberapa pendamping bahkan melaporkan bahwa anak-anak dari KPM mulai menunjukkan kemajuan akademik dan kesehatan fisik yang lebih stabil. Hal ini memperlihatkan bahwa bantuan dari PKH tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berhasil diarahkan untuk mencapai tujuan program serta menunjukkan kemajuan akademik dan kesehatan fisik yang lebih stabil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan program PKH telah tercapai pada sebagian besar keluarga penerima, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan anak.

3.5 Perubahan Nyata

Perubahan nyata mengacu pada transformasi kondisi sosial ekonomi KPM setelah menerima bantuan PKH, indikator ini tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan atau

peningkatan usaha, melainkan juga dari pergeseran pola pikir dan peningkatan partisipasi dalam program-program sosial dan pemberdayaan. Dalam kerangka evaluasi, perubahan nyata diukur melalui tiga aspek utama: kondisi ekonomi, pola pikir, dan partisipasi aktif. Masing-masing aspek ini memberikan gambaran tentang bagaimana bantuan dan pendampingan yang diberikan telah mengubah kehidupan sehari-hari keluarga penerima secara holistik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPM dan pendamping sosial, serta observasi peneliti di lapangan, ditemukan bahwa program telah mendorong transformasi sosial dan ekonomi dalam kehidupan keluarga penerima manfaat. KPM menyatakan bahwa mereka tidak hanya terbantu dalam aspek kebutuhan dasar, tetapi juga mulai menunjukkan perubahan pola pikir terhadap pentingnya kemandirian. Beberapa informan menyebutkan bahwa mereka telah mulai membuka usaha kecil, mengelola keuangan rumah tangga secara lebih terencana, serta mengikuti kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan yang diterima, tetapi juga pada sejauh mana KPM terlibat secara aktif dalam proses pendampingan.

Observasi peneliti pada kegiatan P2K2 dan forum kelompok menunjukkan adanya partisipasi aktif dari KPM dalam diskusi serta peningkatan inisiatif untuk berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini menjadi sinyal positif bahwa program tidak hanya menciptakan ketergantungan, tetapi juga membangun kesadaran baru di kalangan KPM akan pentingnya upaya mandiri. Pendamping sosial mengakui bahwa perubahan sikap ini berkembang seiring dengan intensitas pendampingan dan keberlanjutan program yang menekankan pemberdayaan, bukan sekadar pemberian bantuan tunai. Dengan demikian, indikator perubahan nyata dapat dinyatakan efektif karena program berhasil membentuk proses transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, yang menjadi esensi dari keberhasilan jangka panjang Program Keluarga Harapan di Kota Sukabumi

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Sukabumi belum sepenuhnya tercapai, meskipun menunjukkan hasil baik pada tiga dari lima indikator, yaitu tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Namun, dua indikator lainnya (pemahaman program dan ketepatan sasaran) belum berjalan optimal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian oleh Ervin Gunawan et al., (2023) di Desa Matang Terap, yang menyimpulkan bahwa efektivitas PKH terhambat oleh pemutakhiran data yang belum maksimal dan kegiatan pemantauan yang hanya terbatas pada pertemuan kelompok rutin. (Gunawan, et al., 2023). Sama halnya dengan penelitian oleh Baiq Dewi Kamariani et al., (2020) di Suryawangi Village, yang menyebutkan bahwa meskipun program dinilai cukup efektif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat, namun masih ditemukan tantangan pada ketepatan waktu dan akurasi target penerima. Dalam penelitian ini, temuan serupa juga muncul, yakni keterlambatan penyaluran dana terjadi pada sebagian kecil KPM akibat kendala teknis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme distribusi sudah tersusun, implementasi teknis di lapangan masih memerlukan penguatan dukungan administratif dan digital. (Kamariani et al., 2020).

Berbeda dengan penelitian oleh Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh (2019) di Desa Kupu yang menilai pelaksanaan PKH telah berjalan sesuai prosedur dengan sosialisasi dan verifikasi yang optimal, temuan dalam penelitian ini justru menunjukkan bahwa pemahaman KPM terhadap program belum merata. Beberapa KPM, terutama yang baru tergabung, mengaku masih kurang memahami tujuan program dan kewajiban sebagai penerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks urban seperti Kota Sukabumi yang memiliki dinamika sosial lebih kompleks, efektivitas penyampaian informasi belum sekuat di daerah rural seperti Desa Kupu. (Sutjiatmi & Umaroh, 2019). Selanjutnya, berbeda pula dengan penelitian oleh

Novi Kadewi Sumbawati et al., (2020) di Desa Ropang yang berhasil mencapai efektivitas program dengan skor 78,8% berkat akurasi target dan sosialisasi yang baik, penelitian ini justru menemukan bahwa penetapan sasaran di Kota Sukabumi masih kurang tepat. Masih ditemukan KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan dan keluarga miskin yang belum masuk DTKS. Hal ini mengindikasikan perbedaan pendekatan dan keterlibatan aparat lokal dalam proses verifikasi dan validasi antara wilayah rural dan urban. (Sumbawati et al., 2020)

Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa indikator perubahan nyata telah tercapai secara signifikan. KPM di Kota Sukabumi mulai menunjukkan pola hidup yang lebih mandiri, mengikuti pelatihan keterampilan, dan membuka usaha kecil. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sumbawati et al., (2020) yang menyatakan bahwa program PKH dapat menumbuhkan kemandirian jika disertai dengan pemantauan aktif dan pendekatan pemberdayaan. Dengan demikian, keberhasilan indikator ini menegaskan bahwa meskipun tantangan administratif dan teknis masih ada, program PKH memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial ekonomi jika didukung dengan penguatan kelembagaan dan integrasi program lintas sektor. (Sumbawati et al., 2020)

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan sejumlah temuan menarik di luar indikator utama, yakni adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Sukabumi. Faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap program, ketidaktepatan sasaran akibat data yang belum mutakhir, serta keterbatasan jumlah pendamping sosial yang menghambat efektivitas monitoring. Sementara itu, faktor pendukung meliputi dukungan aktif dari Dinas Sosial, keberadaan forum P2K2 sebagai media komunikasi dan edukasi, serta kerja sama dengan pihak kelurahan dan pemanfaatan teknologi digital melalui HIMBARA yang mempercepat proses pencairan bantuan. Seluruh temuan ini sejalan dengan prinsip pelaksanaan PKH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pelaksanaan program yang berkelanjutan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Sukabumi belum dapat dikategorikan efektif secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat pencapaian positif pada beberapa indikator seperti ketepatan waktu penyaluran, tercapainya tujuan program, serta perubahan nyata pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat, namun masih terdapat kendala pada aspek pemahaman program oleh keluarga penerima dan ketepatan sasaran yang belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi ketidakakuratan sistem verifikasi data, keterbukaan aplikasi cek bansos yang berpotensi disalahgunakan, serta keterbatasan jumlah pendamping sosial. Faktor kondisi infrastruktur seperti jalan yang kurang memadai dan minimnya sarana transportasi juga memperlambat proses pencairan dan verifikasi lapangan, sehingga berdampak pada ketepatan dan kelancaran penyaluran bantuan. Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial Kota Sukabumi telah mengambil langkah perbaikan dengan membatasi akses input data, melakukan audit sistem secara berkala, memperkuat pendampingan melalui pelatihan dan kegiatan P2K2, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi dengan dukungan teknologi informasi. Upaya ini menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan PKH dan semakin mendorong keluarga penerima untuk menuju kemandirian, meskipun masih diperlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu yang mungkin membatasi pendalaman terhadap dinamika perubahan jangka panjang yang terjadi pada KPM. Selain itu, penelitian hanya dilakukan di wilayah Kota Sukabumi, sehingga hasil temuan ini belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, geografis, dan kebijakan lokal yang berbeda. Oleh karena itu, interpretasi terhadap hasil penelitian ini perlu mempertimbangkan konteks lokal secara hati-hati.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa atau wilayah yang lebih luas dengan cakupan waktu yang lebih panjang, baik di kota lain dalam Provinsi Jawa Barat maupun di luar provinsi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implementasi PKH dalam berbagai konteks lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk Dinas Sosial Kota Sukabumi dan semua informan yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, E., & Sunyata, L. H. A. (2023). Efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Matang Terap, Kabupaten Sambas. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Daerah*, 1(1), 30–40. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/2983>
- Hadirianto, T., Wibawani, S., Pendidikan, K., Teknologi, D. A. N., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Studi, P., & Publik, A. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gresik. *Teknik: Jurnal Ilmiah Universitas Bastanghari Jambi*, 23(1), 55–65. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3332>
- Ismayana, V. E., Sasmito, A. P., & Mahmudi, A. (2023). Sistem penunjang kelayakan penerima subsidi Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis website. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i1.6192>
- Kamariani, B. D., Asbarini, N. F. E., Ridwan, A., & Rachman, A. C. (2019). Efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Suryawangi Village, Indonesia. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.
- Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 70–80. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1233>
- Lambsdorff, J. G. (2001). How corruption in government affects public welfare: A review of theory. *CeGE Discussion Paper*, 9, 1–20. <https://hdl.handle.net/10419/32018>
- Magfira, & Saharuddin, E. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 85–95. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.273>
- Nasution, D. A. M. M. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan. *Repository Institut*

- Osei, C. D., & Zhuang, J. (2020). Rural poverty alleviation strategies and social capital link: The mediation role of women entrepreneurship and social innovation. *SAGE Open*, 10(2), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2158244020925504>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>
- Putri, R. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 5(2). <http://eprints.ipdn.ac.id/12595/>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- Sumbawati, N. K., Asmini, H., & Juliawati, B. D. P. (2020). Efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ropang. *Journal of Public Power*, 6(2), 100–110. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.570>
- Sutijatmi, S., & Umaroh, F. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 2(2), 45–55. <https://doi.org/10.24905/igj.v2i2.26>
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Yani, D. R., Sartono, T., & Taufik. (2020). Efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Watolo, Kabupaten Buton Tengah. *Trajectories of Public Administration*, 1(2), 45–60. <https://trajectories.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/26>
- Yin, S., Chen, X., Zhou, X., Chen, C., & Liu, J. (2023). Effect of micro-credit for poverty alleviation on income growth and poverty alleviation—Empirical evidence from rural areas in Hebei, China. *Agriculture (Switzerland)*, 13(5), 1018. <https://doi.org/10.3390/agriculture13051018>